**DINAMIKA PEMEKARAN KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011-2017**

Al Haifa Chairu Aisa

Email : ifachairu7@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regional expansion in the sense of establishing sub-districts which are designed to spur the formation of new centers of economic growth that will bring growth to increase income and welfare of the community, shorten administrative channels, shorten administrative details, also provide open assistance. The author is interested in discussing the expansion of Mandau and Pinggir subdistricts which were divided into Bathin Solapan and Talang Muandau subdistricts. Mandau District and Pinggir Subdistrict are eligible to be expanded considering these two districts are districts with the largest population and area in Bengkalis Regency. During the pemekaran process, the kecamatan has many obstacles, dynamics during the pemekaran process occurred for six years from 2011 to 2017. There are various deficiencies needed to improve and study during the pemekaran process, Mandau District and Pinggir District. In this study, the writer wants to examine how the dynamics of expansion occur and what are the factors that influence expansion so that Mandau and Pinggir can be expanded. The research method used is a qualitative research method and uses descriptive analysis conducted by conducting interviews. The theory used is regional expansion, regional autonomy and the concept of dynamics.

Based on the results of the study found the fact that the dynamics of the division of Mandau District and Pinggir District occurred during the process of expansion from 2011 to inauguration in 2017. The dynamics that occurred quite a lot during 2012 and 2015. The factors that influence this expansion consist of internal factors namely from the Districts of Mandau and Pinggir and external factors originating from the Bengkalis Regency government, Riau Provincial Government and the Central Government. From this research, the writer shows the facts about the changes that occurred in 2011 as the initial year of the proposal for the local government until 2017 which is the year of the inauguration of Mandau Subdistrict which was divided into Bathin Solapan Subdistrict and Pinggir Subdistrict which was expanded as Talang Muandau Subdistrict.

Keywords: Dynamics of Expansion, Actors, Regional Autonomy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan otonomi daerah, pada dasarnya adalah sebagai konsekuensi dari adanya sikap kritis dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah, yang menghendaki agar pemerintah melakukan perubahan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Manifestasi dari eskalasi sikap kritis tersebut, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesadaran warga, terutama dalam hal yang menyangkut hak warga dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, berupa tuntutan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Tuntutan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, akseptabel, transparan, akuntabel dan ekuitabel. Tuntutan-tuntutan seperti itulah yang senantiasa disampaikan, dan hendaknya pihak pemerintah mampu menyikapinya dengan baik untuk mewujudkannya.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal. Sebagaimana diketahui otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Berdasarkan otonomi yang diketahui bahwa pemerintah daerah

mempunyai hak mengatur dan mengurus segala hal yang menyangkut daerah yang telah di bentuk. Secara umum fungsi pemerintah daerah yang mengelola masyarakat lokal oleh warga sendiri yang tinggal di daerah dan itu adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kesehatan, pasokan air bersih, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur jalan atau jembatan. Oleh sebab itu pengelolaan dan pengaturan yang menyangkut operasional dan birokrasi harus berjalan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu perangkat yang membantu daerah atau wilayah untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri adalah kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten atau Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Oleh karena itu, kecamatan merupakan salah satu sektor terpenting dalam membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015 tidak lepas dari konteks isu-isu strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, hal ini karena secara langsung maupun tidak langsung semua aspek perencanaan akan dipengaruhi faktor-faktor tersebut. Ada beberapa isu strategis yang diidentifikasi akan mempengaruhi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah hingga tahun 2015, salah satu diantaranya adalah wacana pemekaran wilayah baik desa maupun kecamatan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan khususnya keseimbangan antar kawasan secara spasial (keruangan).

Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2011 berencana memekarkan

lima kecamatan yakni Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Bengkalis, dan Kecamatan Rumat melalui surat yang disampaikan kepada Gubernur Riau. Kemudian Gubernur Riau menyampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri terkait pemekaran tersebut. Setelah melakukan konsultasi, kemudian Menteri Dalam Negeri mengabulkan permohonan pemekaran Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu atas dasar tiga wilayah kecamatan tersebut terkait dengan kepentingan strategis nasional. Sementara itu, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Rumat dapat mulai diproses tetapi rancangan peraturan daerahnya disetujui bersama setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang kecamatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 terbentuklah tiga kecamatan baru tersebut yaitu Kecamatan Bandar Laksamana yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Talang Muandau yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Bathin Solapan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau.

Pada proses pemekaran tiga kecamatan ini, penulis tertarik meneliti tentang pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang dimekarkan menjadi Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau. Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sudah layak untuk dimekarkan mengingat dua kecamatan ini termasuk kecamatan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di Kabupaten Bengkalis. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Bengkalis Tahun 2010 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis adalah 498.335 jiwa dengan jumlah penduduk Kecamatan

Mandau adalah 219.264 jiwa dengan luas wilayah 937,47 km² dan Kecamatan Pinggir adalah 78.404 jiwa dengan luas wilayah 2.503 km². Kabupaten Bengkalis menjadikan pemekaran kecamatan ini sebagai agenda prioritas Kabupaten Bengkalis karena memang sudah layak dimekarkan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km²)
Mandau	219.264	937,57
Pinggir	78.404	2.503,00
Bukit Batu	30.128	1.128,00
Siak Kecil	18.709	742,21
Rumat	30.550	896,35
Rumat Utara	13.020	628,50
Bengkalis	72.221	514,00
Bantan	36.039	424,40
Total	498.335	7773,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Selama proses pemekaran kecamatan banyak memiliki hambatan, dinamika selama proses pemekaran terjadi selama enam tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Terdapat berbagai kekurangan yang seharusnya diteliti dan dikaji selama proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana proses yang berjalan dalam pemekaran kecamatan ini dan bagaimana dinamika pemekaran yang terjadi sehingga Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir di Kabupaten Bengkalis ini dapat dimekarkan. Identifikasi masalah berdasarkan fenomena diatas adalah :

1. Proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir di Kabupaten Bengkalis ini banyak mengalami kendala selama proses

pemekaran berlangsung karena beberapa faktor baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pemekaran berlangsung cukup lama yakni selama enam tahun dari tahun 2011 hingga 2017.

2. Pemekaran kecamatan terkendala beberapa faktor yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat. Selama pelaksanaan pemekaran tersebut banyak aktor yang terlibat.
3. Banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa pemekaran tersebut dilaksanakan agar pembentukan Kabupaten Mandau segera terlaksana, mengingat permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan kecamatan tersebut salah satunya adalah wilayah kecamatan yang belum mencukupi. Jika pemekaran ini terlaksana, masyarakat menganggap pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Mandau akan dilanjutkan.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah **“Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2017”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dinamika pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tahun 2011-2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pemekaran kecamatan Mandau dan Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis tahun 2011-2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dinamika pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis tahun 2011-2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tahun 2011-2017.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah yang sama.
- b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
- c. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis agar dapat mengetahui dinamika dan proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

D. Kerangka Teori

1) Pemekaran Kecamatan

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah

satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002 : 18) pemekaran kecamatan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- a. Urgensi dan relevan, yaitu apakah urgensi pemekaran kecamatan berkaitan dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
- b. Prosedur, yaitu apakah prosedur pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
- c. Implikasi yaitu sejauh mana pemekaran kecamatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2) Otonomi Daerah

Pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

3) Konsep Dinamika

Menurut Selamat Sentosa, Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok terus menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok berarti suatu kelompok teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. Tujuan analisis data ini adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan apa saja dinamika pemekaran dan faktor yang mempengaruhi dinamika

pemekaran Kecamatan Mandau dan Pinggir sepanjang tahun 2011 sampai 2017.

II. HASIL PENELITIAN

A. Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

Hakikat otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa. Pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Pemekaran kecamatan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis demi kepentingan masyarakat agar memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Serta untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 4 menjelaskan bahwa pemekaran kecamatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan diseluruh wilayah kecamatan serta Keputusan Kepala Desa dan Lurah baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan baru. Selanjutnya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Keputusan Kepala Desa dan Lurah tersebut diajukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya disampaikan

kepada Gubernur dan mendapatkan rekomendasi.

1. Keputusan BPD/ LPMK dan Keputusan Kepala Desa/Lurah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan disebutkan dalam pasal 4, alur proses pembentukan kecamatan yang pertama adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Pemekaran terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari BPD/LPMK jika ingin memekarkan kecamatan. Namun dalam proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir usulan pemekaran pertama kali disampaikan Forum Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir kepada Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil Mandau yang disampaikan oleh Bapak Henri, S.Ag, M.Si pada tahun 2010. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Henri, S. Ag, M.Si:

“Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir merupakan kehendak dari masyarakat Mandau dan Pinggir yang membentuk Forum Tokoh Masyarakat Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang pertama kali menyampaikan aspirasi kepada DPRD, Yang disampaikan melalui saya sendiri selaku ketua forum Anggota DPRD Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir pada saat itu. Mereka mengusulkan untuk memekarkan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang sudah layak untuk dimekarkan. Dalam pertemuan tersebut mereka meminta kepada saya untuk menyampaikan usulan pemekaran kecamatan dari masyarakat Kecamatan Mandau dan

Kecamatan Pinggir kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat ditindak lanjuti”

Kemudian DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menanggapi usulan yang disampaikan DPRD dan menyadari hal tersebut. Pemerintah Kabupaten memang sudah sejak lama merencanakan pemekaran di beberapa kecamatan yang sudah layak dimekarkan. Pemekaran juga mempertimbangkan usulan dari masyarakat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis kemudian menyurati Pemerintah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir untuk segera menggelar rapat mencari dukungan dari seluruh elemen masyarakat di desa/kelurahan masing-masing. Di Kecamatan Mandau rapat digelar bersama seluruh Lurah dan Kepala Desa dari lima belas desa/kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Tokoh Masyarakat untuk membicarakan perihal pemekaran Kecamatan Mandau menjadi.

Pemerintah Kecamatan Pinggir menggelar rapat bersama Camat Pinggir, Lurah dan Kepala Desa dari tiga belas desa/kelurahan yang ada, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Tokoh Masyarakat Pinggir. Bentuk dukungan dibuktikan dengan mengisi form usulan pemekaran kecamatan yang sudah disediakan. Sekaligus melampirkan berita acara pertemuan dan persetujuan dari Lurah atau Kepala Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Kemudian pemerintah kecamatan mempersiapkan proposal atau permohonan pemekaran kecamatan kepada

pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam rapat tersebut juga membahas nama kecamatan baru yang akan dimekarkan, batas-batas wilayah serta menentukan ibukota kecamatan yang akan dibentuk.

2. Pengkajian Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Setelah menerima laporan keputusan pemekaran kecamatan dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan pengkajian di kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Surat Bupati Bengkalis Nomor : 100/Tapem/1447 tanggal 23 Desember 2011 mengajukan permohonan persetujuan pemekaran kecamatan kepada Gubernur Riau dan hasil studi kelayakan pemekaran yang dilampirkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Usulan tersebut meliputi rencana pemekaran Kecamatan Kecamatan Mandau (Kecamatan Bathin Solapan) dan Kecamatan Pinggir (Kecamatan Talang Muandau). Dalam surat yang diajukan kepada Gubernur Riau tersebut didasarkan atas kajian dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Berdasarkan Surat Bupati Bengkalis Nomor : 100/Tapem/1447 tanggal 23 Desember 2011 pertimbangan pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai berikut:

“Usulan pemekaran kecamatan dapat dilakukan melalui pasal 9 yaitu menyatakan bahwa Pemerintah melalui Gubernur selaku wakil pemerintah dapat menugaskan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan pasal 3 dengan pertimbangan untuk kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pembentukan kecamatan yang termasuk dalam kategori ini adalah rencana pemekaran Kecamatan Mandau,

Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu.”

3. Rekomendasi Gubernur

Pada tanggal 22 Maret 2012 Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Riau memfasilitasikan usulan dan presentasi pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengkalis kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Usulan tersebut berdasarkan surat yang disampaikan Bupati Bengkalis Nomor : 100/Tapem/1447 tanggal 23 Desember 2011. Pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili oleh Asisten Tata Praja, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pertanahan Sekretariat Kabupaten Bengkalis untuk mempresentasikan hasil kajian pemekaran kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Saat proses pengusulan pemekaran kecamatan sedang berlangsung, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba menyampaikan perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan yang menghambat proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Pria Gunawan, S.IP selaku Kasubbag Otonomi Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Pengaruhnya berasal dari Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014 sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan moratorium karena bahwa pemekaran daerah dan wilayah dihentikan pemerintah pusat dimulai dari tanggal 1 agustus 2012 sampai selesainya pengangkatan Presiden terpilih. Setelah moratorium dicabut oleh pemerintah pusat barulah pemerintah daerah mengusulkan kembali pemekaran kecamatan kepada Kementerian Dalam Negeri”

Pemekaran kecamatan ini sudah berjalan setahun dari tahun 2011 hingga tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau sudah menyetujui pemekaran dan hanya menunggu pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri. Namun dinamika kembali terjadi pada saat Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 mei 2012, dalam surat itu dijelaskan sebanyak 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bersama beberapa Tokoh Masyarakat dari Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Peduli Kecamatan Mandau-Kecamatan Pinggir menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau tentang adanya keinginan masyarakat agar Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi lima kecamatan. Lima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi tiga kecamatan dan Kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi dua kecamatan. Pemekaran yang dimaksud dengan dasar penggunaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Pada tahun 2013 proses pemekaran berhenti total karena adanya moratorium tentang pemekaran. Selama proses pemekaran berlangsung, pemekaran mengacu pada dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pada tanggal 30 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang Undang baru tentang Pemerintah Daerah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Pergantian peraturan perundang-undangan juga berpengaruh pada pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, sejak dimulai pada tahun 2011 sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada tahun 2014 saat peraturan perundang-undangan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan, pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir masih dalam proses. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempertanyakan bagaimana kelanjutan proses pemekaran setelah ada pergantian undang-undang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk melakukan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bengkalis. Pemekaran kecamatan tetap dilanjutkan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 karena belum ada turunan Peraturan Pemerintah yang dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

4. Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah menerima surat dari Gubernur Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran dan akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk segera diparipurnakan. Pada tanggal 12 Oktober 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan empat Ranperda kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk diparipurnakan. Namun, Ranperda pemekaran Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan alasan Ranperda pemekaran kecamatan sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan diserahkan dalam waktu seminggu. Penjabat Bupati Bengkalis H. Ahmad Syah Harroffie baru menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kecamatan

dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi pada tanggal 26 Oktober 2015.

Peraturan Daerah tentang pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir akhirnya disahkan oleh Penjabat Bupati Bengkalis Bapak H. Ahmad Syah Harroffie. Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Peraturan daerah tersebut disahkan oleh Penjabat Bupati Bengkalis H. Ahmad Syah Harroffie pada tanggal 23 desember tahun 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 desember tahun 2015 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Burhanuddin.

5. Peresmian Kecamatan Baru

Dinamika pemekaran kembali terjadi pada saat penentuan kode wilayah kecamatan. Setelah Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan melalui surat pada tanggal 17 february 2016 belum ada tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri hingga bulan agustus. Padahal Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan sudah disahkan pada tahun 2015.

Desakan dari masyarakat untuk segera meresmikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sudah sering terjadi. Masyarakat ingin pemekaran cepat diresmikan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil inisiatif mengirimkan kembali permohonan persetujuan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor : 100/Tapem/437 pada tanggal 5 agustus 2016 yang intinya agar Kementerian Dalam Negeri segera memberikan persetujuan lebih lanjut dari pembentukan kecamatan tersebut, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan

kepada masyarakat di tiga kecamatan baru tersebut dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama menghadiri sekaligus meresmikan tiga kecamatan baru di Kabupaten Bengkalis dengan penyerahan kode wilayah administrasi Nomor : 138/395/BAK tanggal 25 Januari 2017 kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

1. Faktor Internal

1.1 Perubahan Orientasi Forum Tokoh Masyarakat Peduli Mandau-Pinggir

Proses pemekaran kecamatan sudah berjalan setahun pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau sudah menyetujui pemekaran dan hanya menunggu pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri. Namun dinamika terjadi pada saat Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 1 Mei 2012, dalam surat itu dijelaskan sebanyak 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bersama beberapa Tokoh Masyarakat dari Forum Tokoh Masyarakat Peduli Kecamatan Mandau-Kecamatan Pinggir menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau tentang adanya keinginan masyarakat agar Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi lima kecamatan. Lima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi tiga kecamatan dan Kecamatan Pinggir dimekarkan menjadi dua kecamatan. Pemekaran yang dimaksud dengan dasar penggunaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Padahal pemekaran awalnya sudah disetujui oleh

Tokoh Masyarakat pada pertemuan bersama Lurah atau Kepala Desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Camat pada tahun 2011.

Saat 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bersama beberapa Tokoh Masyarakat dari Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Peduli Kecamatan Mandau-Kecamatan Pinggir menyampaikan keinginan pemekaran, proses pemekaran kecamatan sudah sampai pada tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga usulan tersebut tidak dapat digunakan pada pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

1.2 Keterlambatan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah menerima surat dari Gubernur Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran dan akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk segera diparipurnakan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menyerahkan empat Ranperda kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk diparipurnakan. Namun pada tanggal 12 Oktober 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis hanya menyerahkan tiga Ranperda. Ranperda pemekaran Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu belum diserahkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan alasan Ranperda pemekaran kecamatan sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan diserahkan dalam waktu seminggu.

Menurut wawancara yang dilakukan bersama Bapak Henri, S.Ag, M.Si memang terjadi keterlambatan penyerahan Ranperda oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“Memang terjadi keterlambatan penyerahan Ranperda yang semula

tanggal 12 oktober menjadi 26 oktober 2015. Ranperda baru diserahkan pada saat sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis. Sehingga Panitia Khusus Pemekaran juga terlambat dibentuk untuk bekerja menyempurnakan legal drafting pemekaran Kecamatan Mandau Kecamatan Pinggir.”

Penjabat Bupati Bengkalis H. Ahmad Syah Harrofie baru menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kecamatan dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis H. Heru Wahyudi pada tanggal 26 Oktober 2015. Akibat keterlambatan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah, sidang paripurna diundur sampai Pemerintah Kabupaten Bengkalis Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

2. Faktor Eksternal

2.1 Moratorium Pembentukan Kecamatan

Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir adalah pada tahun 2012 saat proses pengusulan pemekaran kecamatan sedang berlangsung Menteri Dalam Negeri tiba-tiba menyampaikan perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan melalui surat Nomor : 138/1056/SJ pada tanggal 27 Maret 2012.

Saat proses pengusulan pemekaran kecamatan sedang berlangsung, Menteri Dalam Negeri tiba-tiba menyampaikan perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan yang menghambat proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Pria Gunawan, S.IP selaku Kasubbag Otonomi Daerah

Kabupaten Bengkalis sebagai. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Pengaruhnya berasal dari Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014 sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan moratorium karena bahwa pemekaran daerah dan wilayah dihentikan pemerintah pusat dimulai dari tanggal 1 agustus 2012 sampai selesainya pengangkatan Presiden terpilih. Setelah moratorium dicabut oleh pemerintah pusat barulah pemerintah daerah mengusulkan kembali pemekaran kecamatan kepada Kementerian Dalam Negeri”

Moratorium diberlakukan atas dasar untuk menjaga agar tidak ada penambahan data kewilayahan di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri hal itu dilakukan supaya tidak ada penambahan wilayah yang berimplikasi pada daerah pemilihan dan perubahan data agregat kependudukan.

Sejak moratorium diberlakukan pada 1 agustus 2012, proses pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir menjadi terhambat. Pemekaran tidak bisa dilanjutkan sampai moratorium tersebut dicabut oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2014.

2.1 Peresmian Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau

Faktor yang mempengaruhi peresmian pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir adalah karena Kementerian Dalam Negeri terlambat dalam merespon surat yang sudah disampaikan oleh Gubernur Riau yang menyatakan pemekaran sudah disetujui dan disahkan menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 pada 23 desember 2015. Setelah Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan melalui surat pada tanggal 17 februari 2016 belum ada tanggapan dari Kementerian

Dalam Negeri hingga bulan Agustus. Desakan dari masyarakat untuk segera meresmikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sudah sering terjadi. Masyarakat ingin pemekaran cepat diresmikan. Berdasarkan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta disepakati untuk dilakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 26 September 2016 di Pekanbaru antara pihak Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Pusat), Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dilanjutkan peninjauan lapangan pada tiga kecamatan yang baru dibentuk tersebut. Kementerian Dalam Negeri menyetujui pemberian kode wilayah kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Bengkalis kemudian akan mengadakan peresmian kecamatan baru pada bulan Februari tahun 2017.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam penelitian dinamika pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir tahun 2011-2017, setelah dilakukan beberapa analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dinamika didalam upaya pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir untuk memekarkan kecamatan menjadi dua kecamatan. Dinamika yang terjadi secara kronologis dari tahun 2011 sebagai tahun awal deklarasi pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.
- b. Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah yang mengusulkan pemekaran kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai agenda prioritas daerah.

- c. Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir banyak mengalami kendala sehingga pemekaran berlangsung selama enam tahun.

2. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan masukan agar langkah kedepannya bisa lebih baik. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya kesamaan tujuan bagi seluruh elemen masyarakat sebelum mengupayakan sebuah pemekaran. Mulai dari Pemerintah, masyarakat kecamatan hingga Tokoh Masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus tegas dalam menerima usulan dari masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat.
- b. Perlu adanya persiapan yang matang dalam mengupayakan pemekaran, dalam guna menghadapi masalah-masalah yang akan datang, sehingga segala sesuatu yang akan terjadi dapat diatasi.
- c. Kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat merespon dengan lebih baik lagi usulan-usulan pemekaran yang disampaikan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten agar pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa terkendala apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan :

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.

Eko Agustinova, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis.

Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elite*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Keller, Suzzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elite : peranan elit-penentu dalam masyarakat moderen*, Jakarta: Rajawali.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Prasetyo, Budi. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Manusia Dalam Politik Lokal*. Surabaya: Lutfiansyah Mediatama Dan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Sentosa, Slamet. 2019. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supriady, Deddy. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundangan-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Desa
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Desa
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Pemekaran Kecamatan

Sumber Lainnya:

- **Skripsi**

Skripsi Muhammad Afzalurrahman pada tahun 2016 yang berjudul Studi Politik Pemekaran : Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012.

Skripsi Sanjaya yang berjudul Dinamika Aktor Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014 menjelaskan tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur

Skripsi Muhammad Ashsubli tahun 2016 Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau.

Nur Syahdan pada tahun 2017 yang berjudul Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Ben Hansel N. Zebua pada tahun 2017 yang berjudul Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elite Politik)

Skripsi Heru Kurniawan pada tahun 2015 yang berjudul Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009-2011

- **Jurnal**

Jurnal Online Mahasiswa oleh Heru Kurniawan yang berjudul Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Jurnal Online Mahasiswa oleh Muhammad Aulia Wirawan yang berjudul Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur

Jurnal Online Mahasiswa M. Zainuddin yang berjudul Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau

Internet :

<http://m.goriau.com/berita/baca/6-fraksi-di-dprd-bengkalis-setuju-pembentukan3-kecamatan-baru.html>

<http://m.goriau.com/berita/baca/kecamatan-mandau-akan-dimekarkan.html>

<http://m.goriau.com/berita/baca/peresmian-tiga-kecamatan-baru-di-kabupaten-bengkalis.html>